

KONSTRUKTIVISME ADAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

Dini Yuliani
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Korespondensi : diniasyari16@unigal.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang penerapan konstruktivisme adat dalam tata kelola pemerintahan yang berfokus pada bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diintegrasikan ke dalam sistem administrasi modern untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Konstruktivisme adat merupakan pendekatan yang mengakui dan menghormati pengetahuan, nilai-nilai, dan tradisi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi fenomenologi, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dari beberapa sumber referensi baik dari buku-buku maupun dari artikel ilmiah. Kajian ini menunjukkan bahwa konstruktivisme adat menawarkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada, pendekatan ini dapat membantu menciptakan desa yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Konstruktivisme Adat, Modal Sosial, Tata Kelola Pemerintahan, Desa

ABSTRACT

This article examines the application of indigenous constructivism in government governance, focusing on how traditional values can be integrated into modern administrative systems to strengthen community participation and increase the effectiveness of public policies. Indigenous constructivism is an approach that recognizes and respects the knowledge, values and traditions of indigenous peoples in decision and policy making processes. This study uses a qualitative approach with a phenomenological study method, and the data used is primary data and secondary data from several reference sources, both books and scientific articles. This study shows that indigenous constructivism offers significant potential for improving governance in Indonesia. By addressing existing challenges, this approach can help create more equitable, inclusive and sustainable villages.

Keywords : *Indigenous Constructivism, Social Capital, Government Governance, Village.*

A. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di Indonesia, desa-desa memiliki peran strategis dalam struktur pemerintahan

(Sudjatmiko et al., n.d.), berfungsi sebagai unit terkecil yang bertanggung jawab atas pelayanan masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal (Sutoro Eko, 2015). Adat dan kebiasaan masyarakat telah lama

menjadi fondasi kehidupan sosial dan budaya di Indonesia.

Adat merupakan sistem nilai, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi turun temurun, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat dan kebiasaan ini berperan penting dalam membangun modal sosial, yang pada gilirannya menjadi kunci bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di tingkat lokal (Muazir et al., 2020; Yamin et al., 2019). Modal sosial ini terwujud dalam berbagai bentuk, seperti rasa saling percaya, gotong royong, dan kepedulian antar anggota masyarakat (Ismunandar, 2019).

Konstruktivisme adat merupakan sebuah perspektif dalam ilmu sosial yang memandang adat bukan sebagai sesuatu yang statis dan *given* (Santoso & et.al, 2019). Melainkan sebagai suatu konstruksi sosial yang terus menerus dibentuk dan diubah oleh manusia melalui interaksi dan interpretasi (Widjajanti, 2011). Pendekatan ini menekankan bahwa makna dan peran adat tidak ditentukan oleh tradisi atau budaya yang kaku, tetapi dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu dan masyarakat.

Dalam konteks ini, konstruktivisme adat menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami bagaimana interaksi sosial dan nilai-nilai budaya lokal membentuk dinamika tata kelola pemerintahan desa (Danneels et al., 2021). Kearifan lokal yang kaya dan beragam di setiap desa turut memainkan peran kunci dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian konflik. Pentingnya peran masyarakat dalam sebuah pemerintahan terletak pada

kontribusinya dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas kebijakan publik (Cakrawijaya, 2013).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, tata kelola pemerintahan desa di Indonesia menekankan pentingnya pengintegrasian kearifan lokal dalam sistem administrasi desa. Undang-Undang ini mengakui otonomi desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Artinya, pemerintahan desa diharapkan dapat mengembangkan kebijakan dan program yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, tetapi juga menghormati dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh leluhur.

Tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan menjadi kunci utama untuk mewujudkan masyarakat sejahtera (Santoso & et.al, 2019). Sehingga membutuhkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat. Kelembagaan lokal memainkan peran krusial dalam pembangunan desa. Mereka memiliki peran dominan dalam memicu partisipasi dan kemajuan pada masyarakat desa. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak masyarakat adat yang memiliki pengetahuan dan nilai-nilai unik yang dapat berkontribusi pada tata kelola pemerintahan.

Namun masih banyak tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah masyarakat adat tidak memiliki akses dan seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Termasuk kurangnya kesadaran tentang hak-hak

masyarakat adat, kapasitas kelembagaan yang lemah, dan diskriminasi. Kajian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme sosial untuk memahami konstruktivisme adat dalam tata kelola pemerintahan desa.

Konstruktivisme sosial menekankan bahwa pengetahuan dan makna terbentuk melalui interaksi sosial dan budaya (Sulaiman, 2016). Fokus dalam kajian ini pada bagaimana pengetahuan dan praktik adat dapat dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi sosial dan budaya dalam komunitas desa. Hal ini menjadi kerangka yang tepat untuk memahami bagaimana nilai-nilai dan praktik adat dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan desa.

Meskipun konstruktivisme telah diakui dalam kajian akademis, terdapat kebutuhan untuk lebih mendalam memahami bagaimana konsep-konsep konstruktivisme dapat diterapkan secara konkret dalam konteks tata kelola pemerintahan yang melibatkan adat dan kebiasaan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis bagaimana perspektif konstruktivisme dapat menggali peran adat dalam proses tata kelola pemerintahan. Sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk membangun praktek pemerintahan yang lebih inklusif dan berdaya pada tingkat lokal.

Kajian mengenai konstruktivisme adat dalam tata kelola pemerintahan desa memfokuskan pada bagaimana nilai-nilai dan tradisi lokal membentuk dan mempengaruhi mekanisme pemerintahan di tingkat desa. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana nilai-nilai adat tersebut berinteraksi dengan kebijakan formal dan bagaimana integrasinya dapat

meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

B. METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif dipilih karena cocok untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan mendalam, terutama dalam konteks konstruktivisme adat dalam tata kelola pemerintahan desa. Pendekatan fenomenologi, yang berfokus pada pengalaman dan persepsi subjek penelitian, memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna dan esensi dari praktik-praktik adat yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi. Studi kepustakaan ini tidak hanya menyediakan landasan teoritis yang kuat tetapi juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan temuan yang telah ada sebelumnya. Melalui analisis mendalam terhadap literatur yang relevan, peneliti dapat membangun pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai adat dan tradisi lokal mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa, serta bagaimana pendekatan konstruktivisme adat dapat diterapkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan responsivitas kebijakan lokal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bermula dari pengamatan bahwa teori konstruktivisme

menawarkan pendekatan yang kaya dalam memahami hubungan antara adat atau kebiasaan dengan tata kelola pemerintahan. Pendekatan konstruktivisme yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky (1978) menekankan bahwa pengetahuan dan pemahaman terbentuk melalui interaksi sosial dan budaya, mendasari pemahaman kita tentang bagaimana individu belajar dalam konteks sosial (Ngangi, 2011).

Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan teoritis yang dikembangkan dan digunakan dalam studi sosiologi (Handaka et al., 2018). Dalam perkembangan selanjutnya, hubungan internasional pun menetralkan perspektif konstruktivisme dalam diplomasi. Konstruktivisme menekankan bahwa realitas sosial dan politik tidak hanya ditentukan oleh faktor material, tetapi juga oleh konstruksi sosial. Konstruktivisme sosial adalah paradigma yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi.

Teori ini menganggap bahwa pengalaman kehidupan nyata memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Dalam konstruktivisme, individu membangun pengetahuan melalui proses interpretasi dan atribusi makna, serta bergerak aktif dalam mencari, memilih, menginterpretasikan, dan mengorganisasi informasi (Nurdin, M.F. : 2017). *Isu Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya dalam berbagai konteks, termasuk tata kelola pemerintahan. Konstruktivisme sosial membantu kita memahami bahwa pengetahuan dan praktik pemerintahan tidak terbentuk secara

terisolasi, melainkan melalui proses interaksi dan negosiasi makna yang terus menerus antara individu dan komunitas (Berger P.L & Luckmann, T (1966) dalam Liliweri : 2014). Sementara pandangan konstruktivisme adat menambahkan dimensi budaya lokal yang lebih spesifik dan mendalam, terutama dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia.

Konstruktivisme adat menekankan pentingnya memahami simbolisme dan makna budaya dalam kehidupan sosial (Geertz, C : 1973), yang membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai adat dan tradisi mempengaruhi dinamika sosial dan tata kelola pemerintahan (Ismunandar, 2019). Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa baik pengetahuan individu maupun sistem pemerintahan lokal dibentuk dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, menyoroti pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran dan pengelolaan masyarakat.

Perspektif konstruktivisme menekankan pentingnya mengkaji kedudukan adat dalam konteks pemerintahan sebagai indikator, dimensi, atau bahkan instrumen yang dapat membentuk kebijakan dan praktik pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Warren (1993) dalam artikelnya "*Strengthening Indigenous Community: Mobilizing Resources to Meet Local Needs*" menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan tersebut. Dengan memanfaatkan adat sebagai panduan dalam pembuatan kebijakan, pemerintah dapat mengembangkan praktik yang lebih adaptif

dan partisipatif, sehingga lebih mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Chambers (1983) dalam *Rural Development: Putting the Last First*, yang menekankan pentingnya memahami konteks lokal untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam perspektif ini, adat atau kebiasaan bukanlah sesuatu yang statis atau terikat pada norma-norma tertentu, tetapi merupakan produk dari interaksi sosial yang kompleks antara berbagai aktor di masyarakat. Ketika diterapkan dalam tata kelola pemerintahan, konstruktivisme menekankan pentingnya memahami adat dan kebiasaan lokal sebagai sumber pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat memengaruhi kebijakan dan program pemerintah.

Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk melibatkan aktor lokal, seperti tokoh adat, komunitas, dan lembaga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat setempat. Peran masyarakat adat dalam tata kelola pemerintahan desa sangat penting (Akbar et al., 2021). Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang spesifik dengan budaya dan lingkungan setempat.

Sutoro Eko (2014) dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam pemerintahan desa, nilai-nilai adat tidak hanya berperan sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan responsivitas kebijakan lokal terhadap kebutuhan dan aspirasi warga desa. Diharapkan dengan

mengintegrasikan perspektif konstruktivisme sosial dan adat, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam memahami dan mengelola pemerintahan desa, yang berlandaskan pada kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat.

Beberapa desa di Kabupaten Ciamis, menawarkan contoh yang mencolok tentang bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dapat diintegrasikan secara efektif dalam kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti di Desa Sukaharja, Desa Panjalu, Desa Karangpaningal dan Desa Baregbeg, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat ditekankan melalui forum-forum seperti musyawarah desa, di mana warga dari berbagai lapisan sosial ikut serta dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Partisipasi aktif ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sekaligus memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program-program yang dijalankan.

Kepercayaan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat menjadi landasan utama bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Masyarakat yang percaya kepada pemerintahannya akan lebih proaktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Modal sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menjadi elemen penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang memiliki

modal sosial yang kuat akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan. Mereka juga menjadi lebih terbuka terhadap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Konstruktivisme adat sebagai pendekatan dalam memahami tata kelola pemerintahan desa, menekankan pentingnya tradisi dan nilai-nilai lokal dalam membentuk struktur dan proses pemerintahan yang ideal. Pendekatan ini mengakui bahwa kearifan lokal, seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap pemimpin adat, merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola yang partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Andari et al., n.d.; Gumilar et al., 2021). Dengan memanfaatkan kearifan lokal, pemerintah desa dapat menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Sudut pandang konstruktivisme adat dalam konteks pemerintahan desa menurut Sutoro Eko (2015), lebih menekankan pada pentingnya revitalisasi dan penguatan nilai-nilai lokal dalam struktur pemerintahan desa untuk mencapai tata kelola yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam karya dan penelitian Eko, sering menyoroti bagaimana desa seharusnya menjadi pusat inovasi sosial yang berpijak pada kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. Menurut Eko (2015), bahwa mengintegrasikan adat dan tradisi dalam tata kelola desa tidak hanya memperkuat identitas lokal tetapi juga meningkatkan legitimasi pemerintahan desa di mata warganya.

Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan

implementasi kebijakan. Pada gilirannya akan menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan demikian, perspektif Sutoro Eko menegaskan bahwa mengadopsi konstruktivisme adat dalam tata kelola desa dapat membawa perubahan positif yang mendalam, memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu relevan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Di Indonesia, konstruktivisme adat yang menekankan pada pemaknaan sosial dan budaya oleh masyarakat, menawarkan perspektif yang kaya dalam memahami dinamika ini. Tradisi seperti musyawarah desa dan gotong royong tidak hanya mencerminkan kearifan lokal tetapi juga menjadi dasar yang kuat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di desa.

Kebijakan pemerintahan desa di Indonesia secara prinsip menekankan pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal dalam tata kelola desa. Kearifan lokal yang mencakup tradisi, nilai-nilai, dan praktek-praktek budaya yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat desa dan dianggap mampu menciptakan tata kelola yang partisipatif dan inklusif. Namun dalam prakteknya, terdapat pertentangan antara konstruktivisme adat dan kebijakan formal yang berlaku di Indonesia. Kebijakan pemerintah seringkali bersifat *top-down*, dengan regulasi dan prosedur yang tidak selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Selain itu, di Desa Sukaharja juga berhasil menerapkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan warga. Misalnya, melalui pelatihan keterampilan bagi kaum

perempuan dan pemuda, pengembangan usaha mikro, serta inisiatif pengelolaan sumber daya alam yang berbasis komunitas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan dan peluang ekonomi warga desa tetapi juga mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi lokal. Studi kasus Desa Sukaharja menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan program pemberdayaan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera.

Sebagai penutup dalam diskusi, pendekatan ini menekankan bahwa nilai-nilai adat dan tradisi lokal memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan dan praktik pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif. Melalui pemahaman mendalam terhadap simbolisme dan makna budaya, dapat terungkap bagaimana interaksi sosial dan budaya lokal mempengaruhi dinamika pemerintahan desa. Studi ini menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam tata kelola pemerintahan, desa dapat mencapai kemandirian dan keberlanjutan sesuai dengan tujuan bernegara. Oleh karena itu, pendekatan konstruktivisme adat bukan hanya relevan tetapi juga esensial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Kajian tentang konstruktivisme adat dalam tata kelola pemerintahan desa menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dalam struktur dan proses pemerintahan lokal. Melalui pendekatan ini, pemerintahan desa dapat lebih responsif

terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, dan memperkuat kemandirian desa. Studi ini menyoroti bahwa integrasi nilai-nilai adat tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan adaptif.

Dengan demikian, konstruktivisme adat dapat menjadi landasan kuat untuk mengembangkan kebijakan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial-budaya setempat. Ke depan, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan mereka, serta untuk mempromosikan kesejahteraan dan keberlanjutan komunitas lokal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andari, R., Administrator, S. E.-J. B., & 2019, undefined. (n.d.). Pengembangan Model Smart Rural Untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Indonesia. *Samarinda.Lan.Go.Id*. Retrieved April 8, 2023, from <http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/394>
- Cakrawijaya, M. (2013). *Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Terhadap Perkembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Studi Kasus: Desa Wonokerto, Kecamatan Turi*. <http://eprints.undip.ac.id/40198/>
- Danneels, L., Viaene, S., Van den Bergh, J., & Moore, C. (2021). Cultivating Digital Transformation at Arcadis: A Global Expedition into the Digital

- Universe. In *Management for Professionals: Vol. Part F475*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80003-1_19
- Gumilar, E. R., Khaerunnisa, F., Lutfiah, F., Tammi, H. I., & Jaliluddin, J. (2021). Kolaborasi Peran Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2727–2734.
- Handaka, T., Adhi Dharma, F., Realitas Sosial, K., & Peter Berger Tentang Kenyataan Sosial, P. L. (2018). Konstruksi realitas sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang kenyataan sosial. *Kanal.Umsida.Ac.Id*. <https://doi.org/10.21070/kanal.v%vi%i.3024>
- Ismunandar, A. (2019). Dinamika Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Transforamsi Sosial Masyarakat. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 03(2). <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v3i2.1810>
- Muazir, S., Lestari, L., Alhamdani, M. R., & Nurhamsyah, M. (2020). Menuju Desa Cerdas Perbatasan: Survey Kesiapan Desa Cerdas. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 16(2), 120–135. <https://doi.org/10.14710/pwk.v16i2.27417>
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi sosial dalam realitas sosial. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, 7, 1–4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/85>
- Santoso, A. D., & et.al. (2019). Desa Cerdas Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0. In *Center for Digital Society* (Issue May). https://www.researchgate.net/profile/Anang_Santoso/publication/341104216_Desa_Cerdas_Transformasi_Kebijakan_dan_Pembangunan_Desa_Merespon_Era_Revolusi_Industri_40/links/5ead98be45851592d6b4916e/Desa-Cerdas-Transformasi-Kebijakan-dan-Pembangunan-Desa-Meres
- Sudjatmiko, B., Indonesian, I. K.-J. T., & 2014, undefined. (n.d.). Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Undang-Undang Desa. *Theindonesianinstitute.Com*. Retrieved April 8, 2023, from https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2014/01/Materi-Narsum-TIF-Seri-30-Pembangunan-Desa_Budiman-Sudjatmiko.pdf
- Sulaiman, A. (2016). Memahami teori konstruksi sosial Peter L. Berger. *Society.Fisip.Ubb.Ac.Id*, 4(1), 15–22. <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/32>
- Widjanti, K. (2011). *Model pemberdayaan masyarakat*.
- Yamin, M., Darmawan, A. B., Zayzda, N. A., & Ash-Shafikh, M. (2019). Analisis Open Government dan e-Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 133–143.